

PERAN DPRD

DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN DI DAERAH”

Tugas dan wewenang alat kelengkapan DPRD menimbulkan beberapa fokus masalah strategis mengenai peran DPRD dalam pengambilan kebijakan di daerah. Masalah strategis ini terutama terkait dengan sinergitas alat kelengkapan DPRD Lahirnya PP 12/2018 memberikan dampak dalam sinergitas pelaksanaan tugas dan wewenang alat kelengkapan, terutama bila dikaitkan dengan pelaksanaan fungsi anggaran. Dominasi pembahasan fungsi anggaran lebih ditekankan pada kewenangan Badan Anggaran yang melakukan pembahasan bersama tim anggaran dari pemerintah daerah.

REKOMENDASI UNTUK PERAN & DPRD

Pertama, mekanisme konsultasi sangat positif dalam berpotensi dapat membangun komunikasi yang sehat antara DPRD dengan Kepala Daerah.

Kedua, mekanisme konsultasi antara DPRD dengan Kepala Daerah tidak terlepas dari peta koalisi di tingkat lokal dan nasional, termasuk pada koalisi yang terjadi di tingkat provinsi. Untuk itu peta koalisi demikian kiranya perlu dikembalikan pada relasi antara DPRD dan Kepala Daerah yang bersifat check and balances, meskipun masih dalam skala sangat terbatas, mengingat dominasi eksekutif sebagai konstruksi pemerintahan daerah memperoleh pijakan yang kuat di UU No. 23 Tahun 2014.



Penggunaan mekanisme pengawasan menjadi penting untuk menentukan tingkat keberhasilan dan efektivitas fungsi pengawasan. DPRD sebagai lembaga pengawasan politik memiliki beberapa metode pengawasan, antara lain; 1) Pengaduan; 2) Rapat dengar pendapat umum; 3) Kegiatan kunjungan kerja dan 4) Rapat kerja Komisi dengan Pemerintah Keempat metode pengawasan ini perlu diaplikasikan oleh anggota DPRD, agar lebih maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasan.



OLEH:
TIM POLITIK DALAM
NEGERI
Prayudi,
Ahmad Budiman
Aryojati Ardipandanto
Aulia Fitri